

**IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEPELABUHANAN DALAM
FENOMENA PENGELOLAAN JASA LABUH JANGKAR (*ANCHORAGE*)
TANJUNG BERAKIT TAHUN 2021 – 2022**

Oleh:

Ruth Elisabeth Viola Harahap

NIM. 170564201018

ABSTRAK

Wilayah labuh jangkar Tanjung Berakit ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi wilayah tertentu diperairan diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan labuh jangkar di perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau. Tokyo MoU memiliki misi untuk mempromosikan penerapan yang efektif, dan penerapan yang universal dan seragam, dari instrumen IMO/ILO pada kapal yang beroperasi di wilayah tersebut.

Tokyo MoU menjelaskan bahwa pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSCO). Tata kelola kepelabuhanan yang sesuai dengan prosedur PSC dan transparansi merupakan bentuk komitmen yang harus dijalankan atau direalisasikan Indonesia sebagai negara anggota Tokyo MoU terkhusus tempat penelitian penulis UPP Kelas I Tanjung Uban. Kondisi yang sebenarnya atau fakta lapangannya untuk pemeriksaan PSC ini tidak dapat efektif dilakukan dan UPP Kelas I Tanjung Uban dapat dikatakan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk pemeriksaan. Transparansi adalah konsep yang berlaku untuk berbagai tahapan proses pengambilan keputusan, konseptualisasi hingga rencana pengembangan pelabuhan, strategi operasi dan manajemen, perencanaan dan detail dari tindakan yang diputuskan (seperti rencana bisnis, pelabuhan pekerjaan, dan resolusi tata kelola), dan kemudian selama fase implementasi, operasi dan evaluasi hasil yang dihasilkan dapat mengakibatkan dimulainya kembali reformasi pelabuhan. Tingkat transparansi dalam setiap tahapan ini menentukan keterlibatan dan kontribusi penyedia layanan, pengguna, dan pemangku kepentingan, menentukan efektivitas keputusan yang diambil sebagai performativitas.

Kata Kunci: Kepelabuhanan, Labuh Jangkar, Tata Kelola Kepelabuhanan, Dimensi Transparansi, Kategori Transparansi

IMPLEMENTATION OF PORT GOVERNANCE IN THE PHENOMENA OF TANJUNG BERAKIT ANCHORAGE SERVICE MANAGEMENT 2021 – 2022

By: Ruth Elisabeth Viola Harahap

NIM. 170564201018

ABSTRACT

Tanjung Berakit anchorage area is stipulated through the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KM 30 of 2021 concerning the determination of the location of certain areas in waters outside the work environment area and port interest environmental areas that function for anchoring activities in Tanjung Berakit waters, Riau Archipelago Province. The Tokyo MoU's mission is to promote the effective application, and universal and uniform application, of IMO/ILO instruments on ships operating in the region.

The Tokyo MoU explains that checks on the seaworthiness and security of foreign ships in ports are carried out by officials inspecting the seaworthiness and security of foreign ships (PSCO). Port governance that is in accordance with PSC procedures and transparency is a form of commitment that must be carried out or realized by Indonesia as a member country of the Tokyo MoU, especially UPP Kelas I Tanjung Uban. The actual conditions or facts on the ground for this PSC inspection cannot be carried out effectively and UPP Kelas I Tanjung Uban can be said didn't have sufficient capacity for inspection. Transparency is a concept that applies to various stages of the decision-making process, conceptualization through to port development plans, operations and management strategies, planning and details of actions decided (such as business plans, port works, and governance resolutions), and then during the implementation phase, operation and evaluation of the resulting results may result in the resumption of port reform. The level of transparency in each of these stages determines the involvement and contribution of service providers, users and stakeholders, determining the effectiveness of the decisions taken as performativity.

Keywords: Port, Anchorage, Port Governance, Transparency Dimension, Transparency Category.